

## BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Simpulan

Bab ini merupakan simpulan dari penelitian Skripsi berjudul “*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT : Perlawanan rakyat menuju Korea Selatan yang demokratis (1980-1987)*”. Kesimpulan ini merujuk kepada jawaban penelitian dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, antara lain :

*Pertama*, latar belakang gerakan demokratisasi Gwangju berkaitan erat dengan masalah politik, ekonomi dan hukum di Korea Selatan. Kondisi politik Korea Selatan yang mengalami masa transisi sejak lepas dari penjajahan Jepang mendapat bantuan dari Amerika Serikat untuk menjalankan suatu pemerintahan demokrasi yang berafiliasi dengan nilai-nilai barat. Amerika Serikat membantu masyarakat Korea dengan memberikan bantuan dana untuk meningkatkan perekonomian negara dan juga pembangunan negara dengan harapan pengaruh barat dapat tersebar dan menghambat pengaruh-pengaruh komunis dalam jiwa masyarakat Korea Selatan.

Usaha Amerika untuk membuat Korea Selatan yang demokrasi gagal sehingga muncul jiwa-jiwa militer dalam pemerintahan Korea Selatan, salah satu faktor yang menjadi penghambat demokrasi di Korea Selatan adalah lemahnya pengetahuan mengenai nilai-nilai demokrasi dikalangan elite politik bahkan didalam masyarakatnya sendiri, selain itu nilai-nilai atau pengaruh barat yang dibawa oleh Amerika Serikat berbenturan dengan nilai-nilai Asia yang berkembang di Korea Selatan yaitu nilai Konfusianisme yang telah ada sejak lama dalam jiwa masyarakat Korea Selatan, konfusianisme sendiri juga berpengaruh dalam aspek politik di Korea Selatan. Dalam ideologi konfusianisme, suatu kerajaan diibaratkan sebagai suatu keluarga besar, dimana dalam keluarga besar terdapat pembagian kerja dan juga kepala keluarga yang bertugas sebagai pemimpin keluarga. Raja bertindak sebagai pemimpin dan juga diibaratkan sebagai kepala keluarga dan memposisikan dirinya sebagai ‘ayah/bapak’ dalam keluarga besar maka dari itu rakyat yang diibaratkan sebagai ‘anak’ dari keluarga besar tersebut harus menyayangi dan juga menghormati raja yang bertindak sebagai ‘ayah/bapak’.

Raja dianggap benar karena rakyat percaya bahwa raja akan menyejahterakan rakyatnya, karena tidak ada ayah yang akan menyesatkan atau menyengsarakan anaknya sendiri. Berawal dari ideologi konfusianisme tersebut maka lahirlah pemerintah yang otokratis didalam pemerintahan Korea Selatan, namun masyarakat Korea Selatan khususnya masyarakat Jeolla merasa geram dengan kepemimpinan Park Chung Hee yang merupakan pemerintahan yang diktator meresmikan adanya peraturan baru yang disebut Konstitusi *Yushin* dalam konstitusi tersebut sangat menguntungkan pemerintahan Park, melalui konstitusi tersebut park memanjangkan masa jabatannya sendiri yang telah berkuasa dua periode, sehingga masyarakat jeolla merasa dirugikan karena pada masa jabatannya masyarakat Jeolla mendapatkan diskriminasi baik dalam bidang ekonomi sebagai imbas dari kediktatoran Park Chung Hee karena Park hanya membangun perekonomian di Provinsi Kyeongsang yang merupakan provinsi kelahiran Park, hal tersebut merupakan pengaruh dari adanya regionalisme di Korea Selatan.

Setelah terjadinya insiden pembunuhan Park Chung Hee, masyarakat merasa hal tersebut merupakan pintu untuk mendapatkan kembali kebebasan demokrasi hingga terjadi berbagai gerakan pro-demokrasi di berbagai wilayah di Korea selatan terlebih lagi Choi Kyu Ha sebagai Presiden sementara pada saat itu kinerjanya dinilai lamban, kurang kuat untuk memimpin negara dan mendukung konstitusi Yushin terus berlaku. Chun Do Hwan yang pada saat itu merupakan Kepala Komando Keamanan Tentara dan Kepala Markas Besar Investigasi Gabungan diangkat menjadi direktur Badan Intelijen Pusat Korea (KCIA) hal tersebut menjadikan kekuatan militer di Korea Selatan semakin kuat dan gerakan protes semakin menjamur di seluruh wilayah, salah satunya adalah wilayah Gwangju.

**Kedua**, dalam menjalankan Gerakan Demokratisasi Gwangju mahasiswa di wilayah Gwangju dan Seoul bekerjasama dan melakukan beberapa rapat di Universitas. Gerakan semula hanya dilakukan oleh sekelompok mahasiswa secara damai, mahasiswa melakukan gerakan didalam kampus yang selanjutnya turun kejalan dan membicarakan mengenai demokrasi kepada pemerintah di Gedung Pemerintahan Provinsi Jeolla, karena tidak membuahkan hasil kemudian mahasiswa kembali ke universitas untuk membicarakan gerakan selanjutnya ditengah kabar bahwa pemerintah akan mengadakan sebuah pertemuan untuk membicarakan perselisihan politik yang disebabkan oleh beberapa

**Retno Ayu Oktaviani, 2018**

*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

gerakan protes mahasiswa dan gerakan lainnya, beredar juga kabar bahwa pemerintah akan mencabut konstitusi darurat militer dan merencanakan konstitusi atau undang-undang yang baru, hal tersebut didukung oleh kelompok pro-demokrasi karena menganggap bahwa hal tersebut akan menjadi langkah maju pemerintahan Korea Selatan menuju demokrasi, namun gerakan mahasiswa yang berjalan dengan cara damai tersebut dibalas oleh pemerintah dengan gerakan militer, beberapa pasukan militer dikerahkan untuk mengepung Universitas Nasional Cheonnam dan juga beberapa titik di wilayah gwangju termasuk perbatasan di wilayah Gwangju, selain itu pemerintah mengumumkan bahwa Kim Young Sam dan Kim Dae Jung ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah karena dianggap melanggar undang-undang darurat militer.

Penangkapan besar-besaran mulai terjadi di wilayah Gwangju, para aktivis pemuda dan pemimpin yang dianggap radikal di seluruh kota ditahan. Dengan gerakan militer yang luas, agen intelijen militer dan polisi menggerebek kamar tidur mereka dan membawa mereka keluar dengan todongan senjata. Petugas mendorong anggota keluarga mereka untuk sementara, dan menyeret aktivis keluar dari rumah mereka secara kasar. Pemerintah menganggap bahwa para mahasiswa yang melakukan demokrasi merupakan mahasiswa yang berjiwa komunis dan dianggap membahayakan negara. Pemerintah bersama agen militer terus melakukan kekerasan terhadap mahasiswa sehingga membuat masyarakat berpihak pada mahasiswa dan ikut melakukan gerakan, melihat hal tersebut pemerintah kemudian mengunci semua akses menuju wilayah Gwangju dengan menempatkan anggota militer diseluruh jalan yang merupakan akses masuk wilayah Gwangju, tidak hanya mengisolasi Gwangju namun pemerintah juga memanipulasi media sehingga mahasiswa dianggap sebagai pemberontak dan memanipulasi jumlah korban jiwa. Mahasiswa bersama masyarakat tidak hanya tinggal diam, mereka terus melakukan gerakan untuk melawan penyerangan dari agen militer hingga meletus pada tanggal 27 Mei 1980 mereka ditaklukkan oleh kalangan militer.

*Ketiga*, Gerakan Demokratisasi Gwangju menjadi gerbang pembuka adanya demokrasi karena memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat Korea Selatan, melalui gerakan tersebut muncul gerakan lain di berbagai wilayah Korea Selatan untuk menekan pemerintah agar menciptakan Korea Selatan yang demokrasi. Sebagai dampak dari menyebarnya *anti-Americanism* beberapa masyarakat

**Retno Ayu Oktaviani, 2018**

*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

mulai menyerang kantor kedutaan besar Amerika Serikat bahkan hingga membakar bendera Amerika Serikat karena masyarakat yakin bahwa dibalik semua insiden yang terjadi di Korea Selatan merupakan hasil dari campur tangan Amerika Serikat. Berbagai pergerakan mahasiswa yang dilakukan oleh masyarakat terus terjadi namun dilakukan secara damai, namun lagi-lagi pemerintah menjawab gerakan damai masyarakat dengan menggunakan kekerasan salah satunya adalah insiden kematian Park Jeong Chol yang merupakan salah seorang mahasiswa dari Universitas Nasional Seoul disiksa oleh agen militer saat proses interogasi hingga meninggal, namun pemerintah mengumumkan bahwa Park meninggal akibat serangan jantung.

Mendengar hal tersebut masyarakat semakin geram terhadap pemerintah dan melakukan gerakan Juni 1987, Pemberontakan Demokrasi Juni berjalan melalui tiga tahap sebagai berikut; Pada tahap pertama (10 Juni – 18 Juni), demonstrasi nasional yang diadakan pada tanggal 10 Juni melibatkan sekitar 240.000 demonstran di 22 wilayah Korea Selatan, menunjukkan potensi pemberontakan yang berhasil. Khususnya di Seoul, pada tanggal 10 Juni, sebuah pergerakan menuju Katedral Myeongdong, yang akan berlangsung hingga 15 Juni dan membuktikan bahwa ada dorongan untuk perluasan pemberontakan. Kemudian, pada fase kedua (18 Juni – 26 Juni), demonstrasi massal untuk melarang penggunaan gas air mata diadakan di 16 wilayah pada tanggal 18 Juni. Lebih dari 500.000 warga berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut, dan rombongan Busan melibatkan 300.000 - 400.000 warga negara. Pada tanggal 18 Juni demonstrasi dengan mudah menguasai polisi. Terakhir, pada fase ketiga (26 Juni – 29 Juni), 1,4 juta warga berpartisipasi dalam *'Great Peaceful March of People'* yang diadakan di 34 kota dan empat kabupaten pada tanggal 26 Juni. Hal tersebut merupakan pukulan terakhir rezim diktator Chun Doo Hwan yang pada saat itu tengah buntu. Setelah pemberontakan nasional besar telah menyapu Korea Selatan selama 20 hari, rezim Chun akhirnya mengumumkan sebuah rencana untuk menyelesaikan situasi tersebut, yang kemudian disebut dalam Deklarasi 29 Juni. Ini terdiri dari delapan item, termasuk amandemen konstitusi untuk pemilihan langsung Presiden. Akhirnya, membuka jalan menuju transisi demokrasi yang akan mendemokratisasikan rezim otoriter di Korea Selatan. Pada akhirnya pemilihan umum presiden dilakukan sebagai bukti bahwa Korea Selatan akan melakukan pemerintahan secara demokrasi dan pada hasil pemilu menunjukkan bahwa Roh-Tae Woo maju sebagai presiden Korea Selatan

**Retno Ayu Oktaviani, 2018**

*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

ke-13 yang diharapkan masyarakat dapat membawa Korea Selatan menuju demokrasi. Selama menjalankan pemerintahan Roh Tae Woo sedikit demi sedikit menyejahterakan nasib buruh dengan menaikkan upah mereka dari tahun ke tahun.

## 5.2 Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pada pembelajaran Sejarah Indonesia program Peminatan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dikarenakan kajian yang dibahas di dalam skripsi ini berhubungan dengan materi pembelajaran di sekolah Kelas XI semester II yang meliputi Kompetensi Inti (KI): Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Dengan Kompetensi Dasar (KD): Menganalisis pengaruh PD I dan PD II terhadap kehidupan politik, sosial-ekonomi dan hubungan internasional (LBB, PBB), pergerakan nasional dan regional. Melalui skripsi ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan bagi siswa mengenai Pengaruh PD II terhadap sosial, politik, ekonomi yang terjadi selama dekade tersebut di kawasan Asia Pasifik khususnya Korea Selatan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, baik para akedemisi maupun khalayak umum mengenai permasalahan yang terjadi pasca PD II dan perang Korea. Skripsi ini diharapkan juga menjadi dasar atau referensi untuk penelitian lainnya mengenai sejarah kawasan, khususnya mengenai gerakan sosial baik yang digerakan oleh mahasiswa maupun masyarakat. Dalam skripsi ini terdapat beberapa kajian yang diperdalam, seperti gerakan demokratisasi Gwangju dengan periode yang diambil adalah tahun 1980-1987. Namun dalam penelitian ini terdapat kajian yang tidak dikaji secara mendalam seperti peranan Jurgen Hinzpeter, reporter televisi Jerman ADZ yang membantu mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi di wilayah Gwangju ketika Gwangju diisolasi oleh pemerintah Korea Selatan.

**Retno Ayu Oktaviani, 2018**

*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti pun menggunakan penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, atau pun artikel jurnal yang berkaitan. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), skripsi ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah kawasan Korea Selatan khususnya dalam kancah Gerakan Sosial.

**Retno Ayu Oktaviani, 2018**

*GWANGJU DEMOCRATIC MOVEMENT*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)